

ANALISIS LITERASI DIGITAL APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN FAKFAK UNTUK MENDUKUNG KESIAPAN PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

Muhammad Fachry Fachrudin
NPP 32.1117

Asdaf Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: fahri.fahrudin23@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Titis Sari Putri, S.Kom., M.Kom

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Digital transformation in the public service sector requires an adequate level of digital literacy of civil servants and the community so that the process of interaction with government digital services runs effectively. **Purpose:** This study aims to analyze the digital literacy of civil servants and the community based on the four pillars of digital literacy according to the Ministry of Communication and Digital to support the readiness for the implementation of digital public services. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach using a survey method of 89 respondents and added supporting data through 6 informants in urban and semi-urban areas. The research instruments are compiled based on indicators in the four pillars of digital literacy, namely: digital skills, digital safety, digital ethics, and digital culture. **Result:** The results of the study obtained a total score of 4.22 which means that the results of digital literacy are good, which reflects the basic technical skills and cultural adaptation of digital technology use which is quite high among the respondents. However, the pillars of digital safety and digital ethics still have shortcomings from several indicators, which shows that there is still a lack of public understanding related to digital security and internet ethics. **Conclusion:** These findings indicate that increasing digital literacy, especially in security and ethical aspects, is very important to support the effectiveness and sustainability of digital public services. A structured education strategy from the government is needed to increase the understanding and digital readiness of civil servants and the community.

Keywords: Digital literacy, Digital Public Services, 4 Pillars of Digital Literacy, Komdigi, Digital Transformation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik menuntut tingkat literasi digital ASN dan masyarakat yang memadai agar proses interaksi dengan layanan digital pemerintah berjalan efektif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi digital ASN dan masyarakat berdasarkan empat pilar literasi digital versi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendukung kesiapan penerapan pelayanan publik digital. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei terhadap 89 responden dan ditambah data dukungan melalui 6 informan di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator dalam empat pilar literasi digital yaitu: *digital skills*, *digital safety*, *digital ethics*, dan *digital culture*. **Hasil:** Hasil penelitian mendapatkan total skor 4,22 yang berarti hasil literasi digital

sudah baik, dimana mencerminkan kemampuan teknis dasar dan adaptasi budaya penggunaan teknologi digital yang cukup tinggi di kalangan responden. Namun, pilar *digital safety* dan *digital ethics* masih memiliki kekurangan dari beberapa indikator, yang menunjukkan masih terdapat kekurangan pemahaman masyarakat terkait keamanan digital dan etika berinternet. **Kesimpulan:** Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi digital, terutama pada aspek keamanan dan etika, sangat penting untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan pelayanan publik digital. Diperlukan strategi edukasi yang terstruktur dari pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan digital dari ASN dan juga masyarakat.

Kata kunci: Literasi digital, Pelayanan Publik Digital, 4 Pilar Literasi Digital, Komdigi, Transformasi Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah memulai reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem pemerintahan, yang merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi. Penggunaan media digital pada saat ini adalah tulang punggung utama komunikasi dan perubahan dalam segala bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik)(Madjid dkk., 2024). Dengan mengadopsi teknologi informasi maka pemerintah idealnya akan semakin mudah memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Widhi Kawuryan dkk., 2022). Penerapan pelayan publik digital akan membawa pengaruh positif dalam pelayanan pemerintahan Indonesia seperti mempermudah dan mempercepat proses pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengefisienkan kinerja dan anggaran pelayanan pemerintah (Natika, 2024).

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan salah satu upaya strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat(Nurlaila dkk., 2024). Urgensi dan upaya pemerintah untuk transformasi digital Indonesia terdiri dari beberapa aspek (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2019), antara lain, infrastruktur telekomunikasi yang memadai, demografi muda dan melek teknologi, kebijakan/peraturan pendukung, ekosistem yang mendukung transformasi. Salah satu solusi alternatif terhadap tuntutan tersebut adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemerintahan (e-government), seperti media pelayanan online berbasis website (Ikhbaluddin, 2021)

Dalam penyelenggaraan digitalisasi sistem pemerintahan tersebut tentu dibutuhkan sumber daya baik ASN dan masyarakat yang mumpuni dalam penggunaan teknologi digital, kemampuan pemahaman penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disebut literasi digital. Literasi digital seseorang tidak hanya kemampuan dan pemahaman, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab, sesuai dengan norma dan etika, serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Menurut (Sogalrey dkk., 2024) Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan etis, tetapi juga pemahaman dan penggunaan teknologi secara kritis. Sedangkan menurut (Tinmaz dkk., 2022) Literasi digital, yang merupakan salah satu tantangan integrasi teknologi dalam akademik, telah didefinisikan dalam literatur saat ini sebagai kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menavigasi informasi yang terfragmentasi dan kompleks ekosistem.

Hasil indeks literasi digital Kabupaten Fakfak menunjukkan hasil yang belum jelas dimana menunjukkan kualitas literasi digital di Kabupaten Fakfak, berdasarkan pada Gambar 1.3 menunjukkan dari total 80 ribu lebih penduduk hanya 5 responden yang menjadi responden penilaian kualitas literasi digital sehingga membuat kualitas literasi digital di Kabupaten Fakfak belum diketahui apakah mendekati dengan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) ataukah berbeda jauh dengan hasil daerah 3T yang menjadi tolak ukur dalam paham atau kurangnya penduduk dalam menggunakan teknologi digital.

Untuk mendukung persiapan penerapan layanan publik digital, diperlukan evaluasi dan pelatihan terhadap SDM ASN dan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan TIK dengan metode yang tepat, diperlukan suatu ukuran nilai literasi digital ASN dan masyarakat

di Kabupaten Fakfak. Pengukuran tingkat literasi digital dapat dilakukan dengan empat (4) pilar literasi digital yang diumumkan oleh Komdigi sebagai standar kemampuan penggunaan TIK dan Komputer. Adapun kriteria literasi digital (Atenas dkk., 2023) terdiri dari *digital skills* (kemampuan digital), *digital ethics* (etika digital), *digital safety* (keamanan digital), dan *digital culture* (budaya digital). Kriteria 4 pilar literasi digital Komdigi telah digunakan secara luas sebagai edukasi bagi ASN dan masyarakat Indonesia secara umum. Oleh karena itu, terkait dengan dukungan terhadap persiapan SDM untuk implementasi pelayanan digital di Kabupaten Fakfak digunakan kriteria 4 pilar literasi digital.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Pertama, berdasarkan hasil pemetaan *VOSviewer* belum banyak dilakukan penelitian terkait literasi digital di Indonesia bagian timur lebih spesifik di Kabupaten Fakfak, studi terkait lebih banyak dilakukan di kota besar di Indonesia sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait literasi digital di Kabupaten Fakfak. Kedua, skor literasi digital di Fakfak belum diketahui berada pada status apa sehingga peneliti melakukan penelitian yang melibatkan responden yang tergabung antara ASN dan masyarakat Fakfak sehingga dapat mengetahui status literasi digital di Kabupaten Fakfak.

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang literasi digital juga kurang spesifik dalam melakukan penelitian dimana objek penelitian dibedakan antara ASN dan masyarakat, juga penelitian terdahulu tidak menggunakan indikator yang sama seperti yang dilakukan oleh Komdigi sehingga hasil penelitian tidak menyeluruh dalam memberikan gambaran mengenai literasi digital objek penelitian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji literasi digital di kalangan ASN maupun masyarakat dalam konteks pelayanan publik digital. (Amasia dkk., 2024) menggunakan metode studi literatur dan menganalisis data sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pelatihan literasi digital bagi ASN agar dapat memberikan pelayanan digital secara efektif dan kompeten. (Handayani dkk., 2024) meneliti literasi digital ASN peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data SEM (Structural Equation Modeling) untuk menghitung data yang ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital penting dalam memberikan pelayanan publik yang baik didukung dengan komunikasi tim yang baik. Sementara itu, (Novi Ramadani dkk., 2024) meneliti literasi digital ASN dan masyarakat menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur dan analisis konten sehingga menghasilkan kajian terbaru yang sesuai dengan fenomena yang ada. Hasil penelitian ini membuat pemerintah meningkatkan infrastruktur teknologi digital dan melakukan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas literasi digital ASN dan masyarakat. (Rumata & Nugraha, 2020) meneliti literasi digital ASN menggunakan metode kuantitatif pendekatan deskriptif dengan bersumberkan data primer dan sekunder melalui survei kuesioner dengan 43 pertanyaan. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata hasil literasi digital ASN Komdigi dalam kategori baik namun perilaku digital masih tergolong rendah.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga fokus pada literasi digital masyarakat. (Alfiyaturrahmah, 2023) meneliti literasi digital masyarakat menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan meneliti fenomena yang telah terjadi kemudian hasil data dijelaskan secara naratif. Hasil penelitian ini membuat Pemerintah Kota Malang melakukan program agar dapat meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat. (Haerana & Riskasari, 2022) meneliti efektivitas program pelatihan literasi digital yang diberikan kepada masyarakat, dan hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterampilan penggunaan layanan digital pemerintah. Penelitian-penelitian ini memperkuat gagasan bahwa literasi digital, baik di kalangan ASN maupun masyarakat, merupakan faktor fundamental dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang berorientasi digital.

Penelitian ini membedakan diri dengan menggunakan kuesioner 4 pilar literasi digital oleh Komdigi (2020) dan menggunakan wawancara serta observasi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dari beberapa penelitian terdahulu. Perbedaan yang terbaru dari penelitian ini yaitu:

Penelitian ini secara spesifik menganalisis tingkat literasi digital ASN dan masyarakat di Kabupaten Fakfak, sebuah wilayah di Indonesia bagian timur yang masih jarang dijadikan lokasi penelitian terkait literasi digital. Minimnya literatur empiris yang membahas daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi baru dalam pengembangan pemerataan literasi digital secara nasional. Pendekatan Komprehensif Menggabungkan ASN dan Masyarakat, Berbeda dengan mayoritas penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada ASN atau masyarakat, penelitian ini secara simultan mengkaji keduanya. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi pelayanan publik digital di daerah

Penggunaan Instrumen Pengukuran Berdasarkan Empat Pilar Literasi Digital Komdigi Secara Utuh. Penelitian ini menggunakan empat pilar literasi digital Komdigi (Komdigi 2020)—yakni *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture*—sebagai kerangka analisis utama yang diterapkan secara sistematis dalam penyusunan instrumen survei dan analisis data. Hal ini membedakan penelitian ini dari beberapa studi sebelumnya yang hanya menggunakan sebagian pilar atau tidak menggunakan kerangka tersebut secara eksplisit. Penelitian ini tidak hanya berakhir pada analisis data, tetapi juga menyajikan rekomendasi strategis yang relevan dan aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan literasi digital ASN dan masyarakat. Rekomendasi ini disusun berdasarkan temuan empiris dan disesuaikan dengan kondisi sosial, pendidikan, dan kelembagaan lokal.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status literasi digital sumber daya manusia di Kabupaten Fakfak sehingga mengetahui apakah kabupaten ini berada pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar yang menunjukkan kualitas SDM di Kabupaten Fakfak. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah setempat dalam meningkatkan literasi digital di Kabupaten Fakfak serta peneliti berikan rekomendasi upaya yang dapat meningkatkan literasi digital sesuai dengan kondisi di daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tingkat literasi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Kabupaten Fakfak dalam mendukung kesiapan penerapan pelayanan publik digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner literasi digital kepada 89 responden yang terdiri dari ASN dan masyarakat fakfak dengan rentang umur 20-50 tahun. Data tambahan dilakukan melalui wawancara kepada ASN yang memiliki jabatan pada 6 perangkat dinas yang dipilih (Diskominfo standi, Dukcapil, DPMPTSP, Dispersip, Distrik Pariwari dan BKPSDM) Kabupaten Fakfak untuk mengetahui perilaku ASN dan masyarakat dalam pelayanan digital. Observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat data yang telah ditemukan sehingga hasil yang didapatkan dapat lebih akurat.

Dalam menganalisis data dari kuesioner dilakukan dengan mengikuti perhitungan skor literasi digital oleh Komdigi dalam (Status Literasi Digital Indonesia 2022) kemudian hasil literasi digital yang telah diketahui peneliti olah secara statistik deskriptif dimana data tersebut peneliti bandingkan rata-rata sampel yang didapat sehingga mendapatkan kesimpulan dari generalisasi data yang telah diperoleh. Kemudian

analisis data dari wawancara dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi tidak hanya diposisikan sebagai objek yang diteliti, tetapi juga sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh. Pendekatan ini selaras dengan prinsip partisipatif dalam penelitian kualitatif, di mana keterlibatan aktif responden dan informan menjadi dasar penting dalam menggali data yang relevan, kontekstual, dan reflektif terhadap kondisi lapangan.

Masalah penelitian tidak ditentukan secara sepihak oleh peneliti, tetapi dirumuskan berdasarkan hasil kajian literatur awal serta observasi langsung terhadap kondisi pelayanan publik dan kompetensi ASN serta masyarakat di Kabupaten Fakfak. Peneliti juga mengacu pada data sekunder seperti Indeks Literasi Digital Nasional dan hasil pemetaan literatur digital dari *VOSviewer*, yang menunjukkan kurangnya kajian literasi digital di wilayah timur Indonesia.

Instrumen kuesioner dan pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator empat pilar literasi digital Komdigi, namun penyesuaiannya dilakukan melalui diskusi informal dan umpan balik dari beberapa perwakilan ASN dan tokoh masyarakat lokal. Hal ini bertujuan agar bahasa dan konten pertanyaan dapat dipahami dengan mudah sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Fakfak.

Responden dalam penelitian ini diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki pengalaman dan pandangan penting terhadap penggunaan teknologi digital. Dalam wawancara mendalam, informan diberi ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan saran terkait kesiapan pelayanan digital, bukan hanya menjawab pertanyaan tertutup. Proses ini memperkuat validitas data serta memastikan bahwa penelitian mencerminkan realitas sosial yang aktual.

3.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Sebanyak 89 responden (ASN dan masyarakat) terlibat secara aktif dalam pengisian kuesioner yang disusun berdasarkan indikator empat pilar literasi digital dari Komdigi. Responden tidak menyebutkan identitas sehingga dapat menjawab pertanyaan tiap dimensi literasi digital sesuai pemahaman yang mereka miliki agar jawaban yang diberikan dapat menggambarkan secara nyata bagaimana literasi digital di Kabupaten Fakfak.

Wawancara bersama dengan enam informan (terdiri dari pejabat dinas dan ASN golongan III ke atas) dilakukan dalam suasana dialog terbuka dan tidak kaku. Informan didorong untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka dalam perkembangan teknologi digital di Kabupaten Fakfak, bagaimana pandangan mereka terhadap kesiapan institusi dan masyarakat dalam perkembangan teknologi digital, serta kendala yang dihadapi di Kabupaten Fakfak. Beberapa informan memberikan informasi di luar pedoman pertanyaan yang semakin memperkuat hasil penelitian.

Peneliti melakukan observasi langsung ke beberapa perangkat daerah dengan partisipasi aktif dari pegawai dinas setempat. Peneliti melihat bagaimana sistem pelayanan publik bekerja secara nyata, baik yang masih manual maupun yang sudah berbasis digital. Observasi ini memperlihatkan bagaimana penggunaan teknologi masih sangat bergantung pada kompetensi individu dan infrastruktur yang tersedia.

3.3 Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Hasil penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga dirancang agar dapat dimanfaatkan secara praktis oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil menjadi bagian penting dari siklus penelitian yang bersifat kolaboratif dan kontekstual. Melalui penyusunan rekomendasi yang berbasis data lapangan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya program pelatihan literasi digital berbasis lokal. Pemerintah daerah dapat menjadikan hasil studi ini sebagai acuan awal untuk merancang pelatihan sesuai dengan kebutuhan riil

masyarakat dan ASN, terutama pada aspek digital safety dan digital ethics yang berada paling rendah diantara aspek lainnya.

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain, mahasiswa, maupun lembaga pelatihan yang ingin mengembangkan program literasi digital di daerah 3T. Penyusunan laporan dalam bahasa yang komunikatif dan penyediaan data pendukung menjadikan hasil penelitian ini mudah direplikasi dan disesuaikan di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Fakfak.

Melalui partisipasi dalam pemanfaatan hasil, penelitian ini tidak hanya berhenti pada produksi pengetahuan, tetapi turut mendukung proses perubahan sosial yang nyata. Dengan melibatkan aktor-aktor lokal dalam mendiskusikan dan menggunakan hasil penelitian, maka nilai praktis dan kebermanfaatannya penelitian ini dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara berkelanjutan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat literasi digital ASN dan masyarakat Kabupaten Fakfak berada dalam kategori baik, dengan skor rata-rata 4,22 dari skala 5. Temuan ini menunjukkan bahwa secara teknis, mayoritas responden mampu mengoperasikan perangkat digital, mengakses informasi secara daring, serta terbiasa menggunakan aplikasi layanan publik digital. Namun demikian, hasil ini perlu ditelaah lebih lanjut karena terdapat disparitas skor antar pilar literasi digital.

Pilar *Digital Skills* dan *Digital Culture* mencatat skor tertinggi, yang mengindikasikan bahwa responden memiliki keterampilan operasional yang cukup baik dan sudah mulai membentuk kebiasaan bermedia digital yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Komdigi (2020), bahwa semakin luasnya akses terhadap perangkat digital dan internet memungkinkan masyarakat untuk cepat belajar menggunakan teknologi. Namun, kemampuan teknis ini belum tentu sejalan dengan pemahaman kritis terhadap etika dan keamanan digital, yang merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan digital yang berintegritas.

Pilar *Digital Ethics* dan *Digital Safety* menunjukkan skor terendah dalam penelitian ini. ASN dan masyarakat masih lemah dalam hal kesadaran terhadap norma-norma etika digital, seperti penyebaran informasi yang benar, penggunaan bahasa yang sopan di ruang digital, serta perlindungan data pribadi. Kelemahan ini sesuai dengan temuan penelitian Komdigi (2022) yang menyebutkan bahwa aspek etika dan keamanan merupakan tantangan terbesar dalam program literasi digital nasional. Hal ini juga diperkuat oleh (Sharma dkk., 2023), yang menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya soal akses teknologi, tetapi juga mencakup tanggung jawab, perlindungan, dan etika bermedia digital.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak belum memiliki kebijakan atau program pelatihan literasi digital yang sistematis. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan kompetensi antar Perangkat Daerah, terutama pada instansi yang belum memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan atau pelatihan TIK. Temuan ini menjadi indikasi bahwa inisiatif literasi digital masih bersifat sporadis dan belum menjadi agenda prioritas di tingkat lokal, meskipun regulasi nasional seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE telah mengamanatkan transformasi digital dalam pelayanan publik.

Peran Strategis ASN sebagai Agen Perubahan Digital. ASN di daerah seperti Fakfak memegang peran ganda: sebagai pelaksana pelayanan publik sekaligus pengguna sistem digital. Literasi digital mereka sangat menentukan keberhasilan implementasi e-government di tingkat lokal. Temuan ini mendukung pendapat Tuoi & Thanh (2023), yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan SDM di sektor publik dan partisipasi masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah penelitian di masa mendatang disarankan mencakup lebih banyak Perangkat Daerah (PD) dan jumlah responden dan informan yang lebih representatif untuk menggambarkan tingkat literasi digital ASN dan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Fakfak maupun wilayah sekitarnya di Papua Barat. Penelitian di masa depan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk menghasilkan analisis statistik yang lebih mendalam dan memungkinkan pengujian hubungan antar variabel seperti pengaruh literasi digital terhadap kinerja ASN atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik digital.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti tujuikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang konstruktif sejak tahap perencanaan hingga akhir penulisan. peneliti juga berterima kasih kepada seluruh jajaran perannkat dinas Kabupaten Fakfak atas kerjasama, waktu, dan informasi berharga yang telah diberikan. Tak lupa, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, saudara, dan rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat dan doa, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyaturrahmah, A. (2023). Upaya Pengembangan Smart City Kota Malang Melalui Literasi Digital (Studi Kasus Di DPRD Malang: RANPERDA Penyelenggara Perpustakaan). *Jurnal Darma Agung*, 31(2). <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i2.2826>
- Atenas, J., Havemann, L., & Timmermann, C. (2023). Reframing data ethics in research methods education: a pathway to critical data literacy. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00380-y>
- Haerana, H., & Riskasari, R. (2022). Literasi Digital dalam Pelayanan Publik. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 131-137. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v8i1.7174>
- Handayani, K., Utaminingsih, A., & Santoso, D. (2024). Pengaruh Kompetensi Literasi Digital dan Komunikasi yang Intensif terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan Sistem Kerja Tim sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1163-1178. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1086>
- Ikhbaluddin, I. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Online Di Desa (Studi Pada Empat Desa Di Kecamatan Jatinangor). *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(2), 16-30. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2309>
- Ikhbaluddin, I., & Kawuryan, M. W. (2022). Information Technology Development (Website) in Supporting Government Communication in Depok City, West Java Province. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(1), 50-76. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i1.2699>
- Madjid, U., Kawuryan, M. W., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 48-61. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778>
- Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik Di era digital: Menuju pelayanan masa depan Yang lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.37950/kjc8fn65>
- Nurlaila, N., Zuriatin, Z., & Nurhasanah, N. (2024). Transformasi digital pelayanan publik: Tantangan dan prospek dalam implementasi e-government di Kabupaten Bima. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 21-37. <https://doi.org/10.37950/kjc8fn65>
- Ramadani, N., Febrianti, S. D., & Rachman, I. F. (2024). Optimalisasi Literasi Digital oleh Pemerintah untuk Mendukung Agenda SDGs Goals-17: Partnership for The Goals. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(2), 218-229. <https://doi.org/10.61132/semantik.v2i2.630>
- Sharma, Y., Suri, A., Sijariya, R., & Jindal, L. (2023). Role of education 4.0 in innovative curriculum practices and digital literacy– A bibliometric approach. *E-Learning and Digital Media*, 22(1), 1-32. <https://doi.org/10.1177/20427530231221073>
- Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(2), 467-484. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230>
- Sogalrey, F., Safitri, F., Tijow, M., Sembiring, D., & Risamasu, P. (2024). Digital Literacy Research in Education: Trends and Insights. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian*

Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 10(3), 1169-1180.
<https://doi.org/10.33394/jk.v10i3.12490>

Tinmaz, H., Lee, Y. T., Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). A systematic review on digital literacy. *Smart Learning Environments*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40561-022-00204-y>

Wibawati, K. H., & Amasia, F. (2024). Analisis Pentingnya Literasi Digital ASN dalam Mendukung Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 766-772. DOI: [10.35724/mjpa.v6i2.5703](https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5703)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

